
ARTICLE

Koordinasi Antar Stakholder dalam Pengembangan Ekowisata Desa Sungai Langkah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

Maya Shafa Nuwita^{1*}, Rahayu Sulistiowati², Meliyana³

^{1,2,3}, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

How to cite: Nuwita, M.S., Sulistiowati, R., Meliyana., (2021). Koordinasi Antar Stakholder dalam Pengembangan Ekowisata Desa Sungai Langkah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *Administrativa* (3) 3

Article History

Received: 11 Juni 2021

Accepted: 1 Juli 2021

Keywords:

Coordination,
Stakeholder,
Ecotourism

Kata Kunci:

Koordinasi,
Stakeholder,
Ekowisata

ABSTRACT

Tourism development is certainly related to the roles of stakeholders in the implementation of tourism development. Stakeholders are people or groups who are directly or indirectly influenced by something. The existence of stakeholders, of course, there is a coordination channel that is carried out as a key to cooperation in tourism development. This means that without good coordination between stakeholders, tourism development is not directed in a single action. Coordination is a collaborative effort between agencies, institutions, units in program implementation and plays a very vital role so that there is mutual support, assistance and complementarity. The type of research used is descriptive type with a qualitative approach, data collection techniques, observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that the coordination carried out by stakeholders in the development of a tourist attraction in Sungai Langka Village has been running dynamically, which is marked by changes and progress in tourism management. Coordination carried out by stakeholders is not always through official forums or meetings, but through non-formal dialogues but still in a clear corridor arrangement. As for some of the obstacles faced in coordination between stakeholders, such as the emergence of ego thoughts from each individual party who prioritizes personal interests, the second obstacle caused by the lack of budget funds which makes the communication flow a little hampered.

ABSTRAK

Pengembangan pariwisata tentunya dikaitkan oleh peran peran stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan wisatanya. Stakeholder adalah orang-orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung di pengaruhi oleh suatu hal. Adanya stakeholder tentu adanya alur koordinasi yang di jalan sebagai kunci kerjasama dalam pengembangan wisata. Artinya tanpa adanya koordinasi yang baik antar stakeholder maka pengembangan wisata tidak terarah dalam satu kesatuan tindakan. Koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan program dan berperan sangat vital sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan

* Corresponding Author
Email : mayasn7998@gmail.com

melengkapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam pengembangan objek wisata Desa Sungai Langka sudah berjalan dengan dinamis, yang ditandai dengan adanya perubahan dan kemajuan dalam pengelolaan pariwisata. Koordinasi yang dilakukan oleh para stakeholder tidak selalu melalui forum resmi atau rapat, melainkan melalui dialog-dialog non formal namun masih dalam tatanan koridor yang jelas. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam koordinasi antar stakeholder seperti timbulnya pemikiran ego dari masing-masing pihak individu yang menomorsatukan kepentingan pribadi, kedua kendala yang disebabkan oleh minimnya anggaran dana yang membuat alur komunikasi sedikit terhambat.

A. PENDAHULUAN

Suatu pembangunan dikatakan optimal ketika potensi yang dimiliki wilayah tersebut dapat dikelola dengan baik oleh para pemangku kepentingan, dengan mengintegrasikan peran dan fungsi masing-masing untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya penunjang seperti modal dan teknologi informasi. Pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pembangunan nasional diarahkan untuk mampu mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Desa yang merupakan bagian dari daerah memiliki kontribusi besar untuk kemajuan suatu daerah. Di beberapa daerah, salah satu potensi ekonomi yang dapat dikembangkan yaitu pariwisata. Pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, dapat berperan aktif dalam melestarikan dan memperkenalkan hasil budaya daerah. Komponen pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan kepariwisataan antara lain pemerintah, dunia usaha atau industri, masyarakat (termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, pers, LSM, dan akademisi).

Semenjak berdiri sebagai daerah otonom pada tahun 2007, Kabupaten Pesawaran menetapkan dan memantapkan daerahnya menjadi Sentra Pariwisata dan Agropolitan khususnya di Provinsi Lampung. Dalam rangka pengembangan kepariwisataan provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran diposisikan sebagai salah satu sentra pariwisata, khususnya wisata alam dan agrowisata. Melalui program One Village One Destination (Satu Desa Satu Destinasi), Pemerintah Kabupaten Pesawaran berupaya mengembangkan desa-desa di Pesawaran untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. (<https://lampung.rilis.id/sungai-langka-desa-agrowisata-pertama-di-lampung> diakses 16 Oktober 2020)

Pada tahun 2018 ada 45 desa dari 148 desa yang sudah siap dan resmi menjadi desa wisata, salah satu desa wisata yang telah diresmikan adalah desa wisata Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang berada di Provinsi Lampung. Desa Sungai Langka merupakan desa di Kabupaten Pesawaran yang telah dinobatkan sebagai desa agrowisata oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Desa wisata Sungai Langka adalah desa pertama yang diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran pada tanggal 10 Februari 2018.

Desa wisata Sungai Langka memiliki hasil bumi yang berlimpah, terutama hasil perkebunannya yang terkenal sebagai salah satu penghasil buah durian, salak dan jeruk hingga coklat (Kakao). Tidak hanya itu, warga Sungai Langka juga banyak yang membudidayakan ikan air tawar seperti lele, gurame, nila, dan patin disamping perternakan ayam dan kambing. Desa wisata Sungai Langka memiliki peninggalan kolonial jaman

Belanda berupa tempat pemandian. Potensi wisata yang dimiliki Desa Sungai Langka dapat dikategorikan sebagai destinasi ekowisata dimana wisata dikelola oleh masyarakat sekitar dengan dibantu oleh pemerintah dan organisasi masyarakat. Desa Sungai Langka memiliki beberapa potensi desa yang dapat dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat, dengan adanya ekowisata di Desa Sungai Langka dapat menunjang ekonomi masyarakat desa.

Sejak merebaknya pandemi Virus Covid-19 di Indonesia dimulai pada awal tahun 2020 masyarakat dituntut untuk mengurangi interaksi guna menurunkan angka kenaikan Virus Covid-19. Pandemi Virus Covid-19 ini sangat mempengaruhi pola hidup manusia sehingga tidak bisa hidup dengan normal. Masyarakat diharuskan untuk mengisolasi diri di rumah selama beberapa bulan, sehingga banyak masyarakat yang penat dengan suasana di dalam rumah. Sejak diterapkan New Normal oleh pemerintah masyarakat merasa lega, karena masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan aman sesuai Protokol keamanan Covid-19.

Aktivitas yang ditunggu oleh masyarakat selama pandemi salah satunya adalah berwisata. Masyarakat yang penat dengan keadaan di dalam rumah selama beberapa bulan akan memilih untuk berwisata ke wisata alam yang ada disekitar. Kabupaten pesawaran sebagai sentra pariwisata, salah satunya Desa wisata Sungai Langka selama pandemi Covid-19 tidak mengalami penurunan jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung wisata di Desa Sungai Langka pada saat pandemi Covid-19 dapat mencapai 100 orang/bulan. Masyarakat yang datang masyarakat lokal dari Bandar Lampung dan Pesawaran dengan tujuan berkemah di Bukit Sukma Ilang yang ada di Desa Sungai Langka. Wisata berkemah ini sedang sangat digemari oleh pengunjung yang ingin merasakan alam yang masih asri dan suasana matahari terbit.

Menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di daerah, telah memotivasi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekowisata sudah menjadi dalam kegiatan kepariwisataan di Indonesia. Peraturan ini menjelaskan bahwa ekowisata adalah potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya yang menjadi suatu sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal. Pengembangan ekowisata di daerah secara optimal memerlukan strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhitungkan kaidah-kaidah ekonomi, sosial, ekologi, serta yang melibatkan pemangku kepentingan dalam hal mengelola potensi ekowisata.

Pengembangan sektor pariwisata khususnya ekowisata desa Sungai Langka sangat membutuhkan daya dukung yang optimal. Daya dukung dalam hal ini menjadi pokok penting dalam pengembangan ekowisata, tidak hanya daya dukung lingkungan tetapi juga daya dukung yang berhubungan dengan modal, aksesibilitas, sarana prasarana umum, serta fasilitas umum. Sinergitas antar daerah dalam konteks pengembangan ekowisata tidak kalah penting, karena dengan tidak tersedianya daya dukung yang baik bagi pengembangan ekowisata, desa Sungai Langka tidak dapat secara optimal mengembangkan sektor pariwisatanya. Maka dari itu, dibutuhkan suatu kerjasama dan integritas aktor-aktor di dalamnya. Ketersediaan daya dukung tersebut tidak dapat dijalankan oleh salah satu aktor saja tetapi harus melibatkan aktor-aktor yang dapat mendukung pengembangan desa wisata.

Pengembangan pariwisata tentunya dikaitkan oleh peran-peran stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan wisatanya untuk dapat berkolaborasi. Stakeholder adalah orang-orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung di pengaruhi oleh suatu hal, serta mereka yang memiliki kepentingan dalam proyek kemampuan untuk mempengaruhi hasil. Dalam Rahayu (2020) mengungkapkan motivasi stakeholder untuk berkolaborasi ialah dikarenakan kolaborasi akan memberikan hasil positif, pilihan pencapaian solusi untuk kepentingan mereka itu diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang adil di antara para stakeholder, setiap stakeholder memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam mengelola

tanggung jawab yang telah diberikan. Pada penanganan dan pembinaan ekowisata Sungai Langka sektor pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta merupakan bagian dari stakeholder yang menangani ekowisata tersebut. Masing-masing stakeholder tersebut memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan tugas mereka dan melaksanakan tugasnya secara profesional.

Peran aktor yang terlibat, diantaranya terdiri dari peran pemerintah, swasta, masyarakat umum, akademisi dan juga media. Peran dari pemerintah adalah sebagai pembuat regulasi, melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan serta mengintegrasikan program-program daerah dengan program pusat. Integrasi program-program di daerah dengan program di pusat merupakan hal yang penting karena jika tidak ada keterkaitan maka program yang dijalankan tidak ada acuan dan dasarnya. Hal tersebut lebih jauh lagi dapat menghambat proses pemantauan dari pusat ke daerah maupun pelaporan dari pemerintah daerah ke pusat.

Peran masyarakat adalah, bagaimana masyarakat dapat berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam hal menyuarakan keinginan dan kebutuhan masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas masyarakat yang mana program-program dari komunitas masyarakat tersebut dapat disinergikan dengan program pemerintah. Sehingga aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat merupakan bentuk aktualisasi dari program pemerintah. Dalam mengimplementasikan kebijakan, pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat merealisasikan program-program yang

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Manajemen

Pengertian manajemen menurut Terry dalam Hasibuan (2011:8) merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian, yang dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya manajemen menurut Hasibuan (2011:2) adalah ilmu seni dan mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Stoner dalam Badrudin (2013:3) manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari pengertian diatas, maka manajemen merupakan kegiatan pimpinan dengan menggunakan segala sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, yang dimana tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Fayol dalam Badrudin (2013:15) fungsi manajemen terdiri dari :

- a. Planning (Perencanaan), pembatasan yang komplek merumuskan perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai, bila itu di capai, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa penetapan harus dicapai. Dalam perencanaan disusun dan ditetapkan, oleh karena itu lebih tepat planning dirumuskan sebagai penetapan tujuan.
- b. Organizing (Pengorganisasian), organizing merupakan pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Pengorganisasian dapat merumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penerapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

- c. **Commanding**, adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, sara, perintah atau interaksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan baik dan benar-benar tertuju kepada realisasi tujuan yang telah ditetapkan.
- d. **Coordinating** (Koordinasi), merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatuhkan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha tersebut antara lain memberi intruksi perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, mengadakan coaching serta teguran.
- e. **Controlling** (Pengawasan), sering disebut juga pengendalian yaitu mengadakan pemantauan dan koreksi sehingga bawahan dapat melakukan tugasnya dengan benar sesuai tujuan semula.

Dari beberapa pendapat ahli tentang fungsi manajemen, salah satu fungsi manajemen yang akan dikupaskan dalam penelitian ini adalah koordinasi. Koordinasi dalam organisasi maupun antar organisasi itu sangat penting karena tanpa adanya koordinasi dalam suatu organisasi tidak akan tercapai suatu tujuan organisasi yang efektif dan efisien serta tidak kerjasama yang baik.

Tinjauan tentang Koordinasi

Pengertian koordinasi menurut Terry dalam Syaffie (2006:86) adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan terpimpin, dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut menurut Syamsi dalam Rico (2017:12) koordinasi merupakan tugas pimpinan yang dilakukan dengan mengusahakan agar semua kegiatan dapat selaras dan anggota-anggotanya dapat bekerja sama dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai dengan efisien. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Djamin dalam Hasibuan (2011:86) bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Berdasarkan pendapat para ahli yang menyebutkan pengertian koordinasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah suatu usaha maupun kerjasama individu antar individu, organisasi antar organisasi, badan antar badan atau instansi antar instansi untuk memadukan dan menyederhanakan dalam pelaksanaan tugas-tugas guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Ciri-ciri koordinasi menurut Handa dalam Rico (2017:13) yaitu :

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan, oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pada pimpinan, dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena ia telah melakukan koordinasikan dengan baik.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggarakan koordinasi dengan sebaik-baiknya.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus, artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama didalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

- e. Konsep kesatuan tindakan, kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha dari pada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kesatuan usaha atau tindakan meminta kesadaran kepada semua individu. Agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Menurut Syamsi dalam Rico (2017:17) koordinasi yang dapat dilihat dari hal-hal berikut :

- a. Terdapat pembagian yang jelas dalam organisasi
- b. Terbentuknya suasana persaudaraan dan semangat kerja sama yang besar dalam organisasi
- c. Adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup diantara orang-orang dalam organisasi.
- d. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan perencanaan, pembimbing dan pengendalian.

Sedangkan menurut Ndraha (2015:297), koordinasi dapat diukur melalui indikator :

- a) Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi

Informasi merupakan suatu data yang telah dirangkum ataupun dimanipulasi dalam bentuk yang lainnya, tujuan pencarian data tersebut adalah untuk pengambilan keputusan. Komunikasi ialah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat, menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer.

- b) Kesadaran pentingnya koordinasi, dalam berkoordinasi perlunya kesadaran penuh dari setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi, hal ini dapat dilihat dari komunikasi dan informasi yang terjalin.
- c) Kompetensi Stakeholder, meliputi : ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat dan ada tindakan ahli dibidang pembangunan yang terlibat
- d) Kesepakatan dan komitmen, dalam koordinasi kesepakatan sangat dibutuhkan sebagai kunci
- e) Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi
- f) Insentif koordinasi, yaitu sanksi pihak yang ingkar atau tidak mentaati kesepakatan bersama.
- g) Feedback sebagai masukan balik kedalam proses koordinasi .

Tinjauan tentang Stakeholders

Menurut Freedman dalam Saharuddin (2013:233) Stakeholder merupakan kelompok atau individu yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Pendapat lain di ungkapkan oleh Budimanta dalam Saharuddin (2013:233) mengungkapkan bahwa Stakeholder juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan sendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok jika memiliki karakteristik yang mempunyai kekuasaan legitimasi, kepentingan terhadap program.

Para pemangku kepentingan di sebuah institusi manapun memiliki pengaruh yang penting bagi keberlangsungan institusi maupun lembaga. Munaharo (2016:32) mengungkapkan bahwa para pemangku kepentingan itu lebih sering disebut dengan Stakeholder. Yang termasuk dalam Stakeholder ialah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan mempengaruhi maupun di pengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung. Adapun menurut Rahayu (2020) Stakeholder yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan, mengetahui kepentingan dan pengaruh Stakeholder dalam

memetakan hubungan antara pihak berdasarkan besarnya pengaruh dan kepentingan masing-masing pemahaman dalam pengembangan organisasi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan untuk teknik keabsahan data menggunakan teknik perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Formulasi Kebijakan dalam Rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung

Formulasi kebijakan merupakan tahap paling awal dan paling kompleks dalam proses pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Manakala formulasi kebijakan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif maka hasil kebijakan yang dirumuskan tidak akan bisa mencapai tataran optimal. Hal ini tampak jelas di dalam formulasi kebijakan pada pembuatan Raperda Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung. dalam hal ini pembuat kebijakan melakukan interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dan stakeholder yang terkait.

Pada bab ini tahapan selanjutnya yaitu pembahasan yang akan peneliti deskripsikan berdasarkan pada fokus penelitian dan juga pada sub bab hasil penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan pembahasan dari penelitian yaitu mengenai “ Evaluasi Pengendalian Inflasi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2018 “ dengan menggunakan model evaluasi Karl Ludwig Von Bertalanfy dalam Wirawan (2011: 107).

Koordinasi antar Stakeholder dalam pengembangan Ekowisata Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Koordinasi antar stakeholder dalam pengembangan objek wisata sangatlah penting karena dianggap sebagai alur komunikasi yang menentukan pencapaian atas tujuan. Sedangkan Stakholderyang dikemukakan dalam Rahayu (2020) yaitu yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan, mengetahui kepentingan dan pengaruh Stakholder dalam memetakan hubungan antara pihak berdasarkan besarnya pengaruh dan kepentingan masing-masing pemahaman dalam pengembangan organisasi. Berikut ini koordinasi antar stakeholder pengembangan ekowisata Desa Sungai Langka menurut Ndraha (2015:297) dalam poin-poin sebagai berikut :

a. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi

Pertama komunikasi yaitu merupakam aktifitas dasar manusia, dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik kehidupan sehari-hari. Tidak ada manusia yang terlibat dengan komunikasi, komunikasi yang terjalin dalam koordinasi harus menciptakan hubungan yang produktif. Berdasarkan hasil penelitian komunikasi yang berjalan antar stakeholder pada objek wisata Desa Sungai Langka ialah komunikasi yang aktif karena beberapa pihak selalu mengkomunikasikan secara langsung bila ada kegiatan atau kendala yang dihadapi dalam kegiatan. Komunikasi juga terlihat aktif bila saat adanya rapat yang diselenggarakan, ada komunikasi dua arah dan saling menanggapi.

Adapun pencapaian koordinasi dapat diukur dengan indikator menurut Ndraha (2015:297) yaitu (informasi, komunikasi, dan teknologi informasi) pertama bawasanya pada objek wisata Desa Sungai Langka informasi yang diterapkan sudah baik dikatakan baik

karena informasi yang telah berjalan tersampaikan dengan baik sebagai alur koordinasi, informasi merupakan salah satu kunci pencapaian koordinasi karena informasi menjadi langkah awal sebuah tujuan yang akan dicapai. Kedua, komunikasi yang terjalin telah berjalan dengan baik berdasarkan informasi yang telah berjalan baik komunikasi dalam alur yang baik pula komunikasi yang berjalan dua arah saling menanggapi antar stakeholder dalam pengembangan wisata Desa Sungai Langka hal ini menjadi adanya timbal balik dan respon yang baik yang mengungkapkan bahwa koordinasi yang berjalan dianggap baik. Ketiga, teknologi informasi yang digunakan dengan melalui media massa dan media online telah berjalan sebagai media promosi dan sosialisasi. Adanya teknologi informasi sebagai media penghubung informasi dan komunikasi dalam alur koordinasi pengembangan wisata Desa Sungai Langka.

b. Kesadaran pentingnya koordinasi

Pada pengembangan objek wisata Desa Sungai Langka para stakeholder perlunya menyadari bahwa adanya rasa saling membutuhkan dalam menjalankan pengelolaan wisata. Rasa sadar saling membutuhkan berkaitan dengan kemauan bahwa koordinasi harus dijalankan sebagai langkah bahwa koordinasi menjadi jembatan dalam pengembangan wisata berjalan dengan baik sesuai dengan pendapat Djamin dalam Hasibuan (2011:86) bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Dalam pengembangan wisata Desa Sungai Langka dalam melihat adanya kesadaran dalam berkoordinasi ditandai adanya kerja sama dalam membuat dan mencapai tujuan hal ini sesuai dengan pendapat Handa dalam Rico (2017) Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggarakan koordinasi dengan sebaik-baiknya, pembentukan tujuan terdapat dalam pembentukan bagaimana para stakeholder membuat sebuah strategi agar koordinasi berjalan dengan baik.

Peran para Stakeholder untuk merumuskan strategi perkembangan pariwisata diantaranya merumuskan beberapa strategi yaitu penyedia sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan daya tarik wisata daerah, peningkatan peran serta masyarakat. Kesadaran pentingnya koordinasi, pemerintah dan masyarakat telah menyadari bahwa pentingnya koordinasi antar stakeholder karena dianggap dalam pengembangan objek wisata Desa Sungai Langka akan berjalan dengan baik jika koordinasi antar stakeholder juga berjalan dengan baik sebagai mana tujuan koordinasi menurut Handa dalam Rico (2017) adalah tujuan bersama. Kesatuan usaha atau tindakan meminta kesadaran kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

c. Kompetensi partisipan (Stakeholder), meliputi : ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat dan tindakan ahli dibidang pembangunan yang terlibat

Sebagai upaya dalam pembangunan pariwisata tentunya harus melalui rancangan-rancangan atau aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan pengembangan pariwisata serta penentuan aktor-aktor yang berperan dalam strategi pengembangan pariwisata. Selain itu, juga adanya alur koordinasi dalam pengembangan wisata mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Peran dari masing-masing stakeholder dapat dimengerti dengan baik bilamana tugas yang dikerjakan dapat dilakukan secara profesional. Terdapat beberapa indikasi yang menilai setiap aktor yang berperan seperti beberapa pembuat kebijakan, kordinator, fasilitator, Implementor dan juga akseletator.

Pengembangan wisata tentunya didukung dengan faktor utama jejaring kerjasama yang dilakukan antar stakeholder pariwisata. Berdasarkan pengelompokan kerjasama menurut Sulistiani (2014) masuk dalam kategori kerjasama yang terjadi antara dua belah pihak atau

lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnta melakukan kerjasama, saling memberikan manfaat, sehingga mencapai tujuan secara optimal. Kerjasama yang dilakukan stakeholder pada pengembangan objek wisata Desa Sungai Langka yakni :

- a. Pemerintah Desa dengan POKDARWIS (Masyarakat) Desa Sungai Langka melakukan kerjasama berupa perawatan wisata dan pengadaan sarana prosarana pariwisata antara lain, warung makan, wahanan permainan, dagangan hasil tani masyarakat.
- b. Pemerintah desa dengan akademisi memberikan fasilitas pengetahuan dan pelatihan untuk materi pengembangan objek wisata.
- c. Pemerintah dengan aparaturn keamanan melakukan kerjasama untuk mengamankan objek wisata.
- d. Kesepakatan dan komitmen

Stakeholder menurut Freeman dalam Rico (2017) dalam sebuah organisasi adalah individu atau kelompok yang dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari sebuah organisasi. Dunking (2014: 227) juga mengatakan bahwa stakeholder mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam banyak hal termasuk permintaan dan penawaran pariwisata, regulasi, pengelolaan dampak pariwisata, sumber daya manusia, dan yang lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata RI No 14 tahun 2016 yang berisikan mengenai medeol pentahelix sebagai pendorong sistem kepariwistaan yang terbagi sebagai berikut:

- a. Pemerintah

Menurut Sheehan et al. (2007) pemerintah bertindak sebagai pemberi modal dan memberikan visi untuk pengembangan masyarakat dan wisata, serta memastikan kepentingan infratraktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan untuk pihak pemerintah pengembangan objek wisata dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang disediakan di tempat wisata, membuat media promosi lebih luas lagi, melakukan pelatihan SDM untuk meningkatkan kemampuan pengelola objek wisata. Pemerintah berperan aktif sebagai penyedia fasilitas objek wisata pada Wisata Desa Sungai Langka.

- b. Komunitas

Menurut Hermantoro (2011) menjelaskan bahwa komunitas lokal adalah komunitas yang tinggal pada area geografis yang sama, pada saat ini komunitas lokal tidak lagi merupakan suatu kelompok homogeny, bahkan komunitas lokal itu pun hamper selalu bersifat heterogen sebagaimana banyak dipahami didalam realitas sosial. Masyarakat yang bertempat tinggal di zona objek wisata menjadi fokus komunitas dalam target menjadi anggota. Dikarenakan pengembangan wisata Desa Sungai Langka mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap mata pencarian, terbentuklah POKDARWIS Melati Berbakti yang sampai saat ini dikatakan sebagai penggerak pariwisata yang ada didesa Sungai Langka. Tugas yang diberikan untuk POKDAWIS ialah merawat dan menjaga sarana dan prasarana yang disediakan di tempat wisata, selain itu juga POKDARWIS dapat mendirikan usaha dengan memanfaatkan hasil pertanian warga setempat.

- c. Akademisi

Peran akademisi adalah memberikan pandangan dan pelatihan tentang bagaimana mengembangkan objek wisata dengan banyak inovasi dan ide terbaru untuk menarik wisatawan datang. SDM pariwisata berperan selaku motor penggerak keberlangsungan pengembangan wisata maka dari itu akademisi membantu untuk memberikan ilmu untuk kelompok masyarakat yang ikut serta dalam mengelola objek wisata.

Pencapaian untuk pengembangan wisata yang baik di dukung dengan koordinasi antar stakeholder yang baik pula.

- e. Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi

Integrasi menurut Sukarno (2016) merupakan suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan atau sebuah sistem yang mengalami pembaruan hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dari berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama, dengan adanya integrasi koordinasi dapat berjalan secara terarah disemua tingkatan. Berdasarkan penelitian menjelaskan bahwa integrasi yang terjadi pada seluruh pemangku kepentingan objek wisata Desa Sungai Langka, adanya kesatuan pikiran untuk mengembangkan objek wisata secara bersamaan hal ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam koordinasi antar stakeholder.

Suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan, tindakan, dan unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Berdasarkan hasil penelitian sinkronisasi terlihat diantara pemangku kepentingan telah membuat satu pemikiran yang sama yaitu untuk memajukan objek wisata yang ada di Desa Sungai Langka. Adanya keselarasan pikiran dalam kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan Objek Wisata Desa Sungai Langka. Hal ini sebagai penetapan kesepakatan yang dibuat oleh para stakeholder sebagai panduan atau acuan tugas masing-masing sebagai pemangku kepentingan sebagaimana telah dijelaskan pada poin kesepakatan dan komitmen.

f. Insentif koordinasi, yaitu sanksi pihak yang ingkar atau tidak mentaati kesepakatan bersama.

Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri dalam pengembangannya tentunya tidak terlepas dari beragam pemangku kepentingan, namun hal itu bukan merupakan hal yang mudah bagi pemangku kepentingan dikarenakan harus terjalinnya koordinasi yang kokoh antar stakeholder. Seperti yang diungkapkan Syamsi dalam Rico (2017:12) koordinasi merupakan tugas pimpinan yang dilakukan dengan mengusahakan agar semua kegiatan dapat selaras dan anggota-anggotanya dapat bekerja sama dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai dengan efisien. Adanya sanksi yang akan diterima oleh para stakeholder yang melakukan pelanggaran ataupun tidak mentaati kesepakatan bersama merupakan titik terang agar dapat menjaga kesepakatan dan komitmen yang telah dibangun.

Sanksi pihak yang ingkar yang diberikan dalam koordinasi pengembangan wisata Desa Sungai Langka berupa hukuman dikeluarkan dari susunan para stakeholder dan memberikan ganti rugi atas perbuatan ingkar yang dilakukan. Kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya direncanakan, dimusyawarakan terlebih dahulu jadi semua pihak dapat mengetahui dan memahami apa yang telah disepakati dan menjadi komitmen atas kesadaran masing-masing. Dengan adanya sanksi yang diberikan dapat menjadi acuan agar para stakeholder dapat mempertahankan alur koordinasi yang baik sehingga dapat menghasilkan kesatuan yang saling melengkapi, sesuai dengan pendapat Handa dalam Rico (2017) Konsep kesatuan tindakan, kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa harus mengatur usaha-usaha dari pada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama.

g. Feedback sebagai masukan balik kedalam proses koordinasi selanjutnya

Koordinasi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam pengembangan objek wisata Desa Sungai Langka sudah berjalan dengan dinamis, yang ditandai dengan adanya perubahan dan kemajuan dalam pengelolaan pariwisata. Koordinasi yang dilakukan oleh para stakeholder tidak selalu melalui forum resmi atau rapat, melainkan melalui dialog-dialog non formal namun masih dalam tatanan koridor yang jelas. Syarat koordinasi yang efektif salah satunya adalah melalui komunikasi yang efektif dan tukar menukar informasi secara terus menerus sehingga perbedaan antar individu dan bidang dapat diatasi dan akan membawa perubahan-perubahan kebijakan maupun penyesuaian program untuk masa mendatang. Selain itu pelaksanaan koordinasi yang berjalan baik telah disesuaikan dengan pendapat Syamsi dalam Rico (2017:17) koordinasi yang dapat dilihat dari hal-hal berikut pertama terdapat

pembagian yang jelas dalam organisasi, Kedua terbentuknya suasana persaudaraan dan semangat kerja sama yang besar dalam organisasi, Ketiga adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup diantara orang-orang dalam organisasi, Keempat koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan perencanaan, pembimbing dan pengendalian.

1. Faktor kendala yang mempengaruhi koordinasi antar Stakeholder dalam pengembangan Ekowisata Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Konsep adanya kesesuaian Kawasan Ekowisata, yaitu sebuah konsep yang mengedepankan perencanaan pemetaan wilayah, karena keberadaan suatu kawasan wisata sangat terkait erat dengan penggunaan lahan yang merupakan unsur penting dalam perencanaan wilayah. Penggunaan suatu kawasan menjadi wilayah ekowisata akan mempengaruhi perubahan ekologi dan sosial masyarakat. Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai sikap dan pola perilaku antar kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Karenanya dalam pengembangan kawasan konservasi menjadi area wisata perlu mempertimbangkan bahwa kegiatan wisata tidak boleh menyebabkan terganggunya fungsi kawasan konservasi yang diakibatkan oleh pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kawasan yang ada.

Secara umum koordinasi antar stakeholder dalam pengembangan wisata Desa Sungai Langka sudah berjalan baik, namun tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses koordinasi berdasarkan stakeholder yaitu :

a. Masyarakat, kendala yang dihadapi oleh masyarakat ialah pertama adanya mindset egosektoral dari stakeholder yang berdampak adanya kerapuan dalam komitmen. Kedua keterbatasan alat dan sarana pendukung dalam menyediakan fasilitas yang lebih memadai. Ketiga kendala yang disebabkan oleh keadaan cuaca dan alam, cuaca yang kurang baik juga menjadi kendala karena bisa menyebabkan banjir dan longsor karena Wisata Desa Sungai Langka berada di daerah rawan longsor dan rawan banjir.

b. Pemerintah , kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses pengembangan wisata Desa Sungai Langka ialah terbatasnya anggaran menjadi faktor penghambat dalam pengembangan objek Wisata Desa Sungai Langka, keterbatasan anggaran dana dari desa sering membuat keterbatasan dalam memperoleh sarana dan prasarana, namun pemerintah desa dan komunitas yang peduli akan wisata desanya mencari jalan keluar mengenai dana dengan mendirikan usaha dari hasil pertanian dan dijual belikan di area wisata sehingga hasil yang didapat dibagi dengan pengelola wisata sehingga memperoleh bantuan dana untuk merawat objek wisata Sungai Langka.

Sektor pariwisata dapat menjadi kekuatan ekonomi yang tak terduga bila dikelola dengan benar. Kemasan dalam penyajian pariwisata juga terlihat menarik serta tampil beda, dengan keunggulan yang ditonjolkan serta berbanding suatu daerah harus dikemas secara elegan. Terbukti dengan adanya di liat pariwisata yang datang dengan jumlah yang sangat besar terlihat dampak pertumbuhan ekonomi yang besar pula. Dengan banyaknya wisatawan menuntut pemerintah daerah harus mampu menyediakan fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung perkembangan pariwisata. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang nyata sebagai bentuk kontribusi terhadap wilayahnya.

Pengembangan sektor pariwisata khususnya ekowisata desa Sungai Langka sangat membutuhkan daya dukung yang optimal. Daya dukung dalam hal ini menjadi pokok penting dalam pengembangan ekowisata, tidak hanya daya dukung lingkungan tetapi juga daya dukung yang berhubungan dengan modal, aksesibilitas, sarana prasarana umum, serta fasilitas umum. Sinergitas antar daerah dalam konteks pengembangan ekowisata tidak kalah

penting, karena dengan tidak tersedianya daya dukung yang baik bagi pengembangan ekowisata, desa Sungai Langka tidak dapat secara optimal mengembangkan sektor pariwisatanya. Maka dari itu, dibutuhkan suatu kerjasama dan integritas aktor-aktor di dalamnya.

E. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan Indikator Koordinasi yang telah dibahas maka dapat disimpulkan dalam beberapa indikator Koordinasi yaitu :

- a. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi bawasanya pada objek wisata Desa Sungai Langka informasi yang diterapkan sudah baik, komunikasi yang terjalin telah berjalan dengan baik, teknologi informasi yang digunakan dengan melalui media massa dan media online telah berjalan sebagai media promosi dan sosialisasi.
- b. Kesadaran pentingnya koordinasi, pemerintah dan masyarakat telah menyadari bahwa pentingnya koordinasi antar stakeholder karena dianggap dalam pengembangan objek wisata Desa Sungai Langka akan berjalan dengan baik jika koordinasi antar stakeholder juga berjalan dengan baik.
- c. Kompetensi partisipan, dilihat dari adanya pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan untuk mengelolah pariwisata, pada pengembangan objek wisata Desa Sungai Langka pelatihan dan pembinaan ini dilakukan pemerintah desa dengan bekerjasama antara Desa dan Akademisi untuk memberikan materi tentang pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- d. Kesepakatan dan komitmen, pada pengembangan objek wisata Desa Sungai Langka kesepakatan untuk mengembangkan dan memajukan objek wisata yang ada di Desa Sungai Langka telah memperoleh kesepakatan untuk satu tujuan serta telah berkomitmen bersama-sama untuk menjaga wisata yang ada di Desa.
- e. Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi, penetapan kesepakatan selalu diawali dengan musyawara oleh pihak pemerintah dengan mengumpulkan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata Desa Sungai Langka.
- f. Insentif koordinasi sebagaimana diketahui bahwa sanksi pihak yang ingkar atau tidak mentaati kesepakatan bersama akan menimbulkan perpecahan maka dari itu dalam pengelolaan objek wisata Desa Sungai Langka mengurangi dan menghindari penyebab perpecahan dengan menyatukan suara agar memperoleh kesepakatan bersama.
- g. Feedback sebagai masukan balik kedalam proses koordinasi selanjutnya antar stakeholder menjaga komunikasi dan komitmen agar koordinasi tetap berjalan sesuai dengan keinginan dan dapat mencapai tujuan. Koordinasi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam pengembangan objek wisata Desa Sungai Langka sudah berjalan dengan dinamis, yang ditandai dengan adanya perubahan dan kemajuan dalam pengelolaan pariwisata. Koordinasi yang dilakukan oleh para stakeholder tidak selalu melalui forum resmi atau rapat, melainkan melalui dialog-dialog non formal namun masih dalam tatanan koridor yang jelas

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam koordinasi antar stakeholder seperti timbulnya pemikiran ego dari masing-masing pihak individu yang menomorkan kepentingan pribadi, kedua kendala yang disebabkan oleh minimnya anggaran dana yang membuat alur komunikasi sedikit terhambat.

Saran

1. Stakeholder dalam hal ini pemerintah sebagai fasilitator dalam mengelola objek wisata harus lebih memperhatikan koordinasi dalam setiap menyediakan kebutuhan objek wisata Desa Sungai Langka seperti meningkatkan fasilitas yang ada dan mengembangkan sumber daya manusia agar tujuan yang di inginkan dapat tercapai yaitu terkelolanya objek wisata Desa Sungai Langka.
2. Stakeholder sebaiknya meningkatkan alur kerjasama dan menjalin koordinasi dengan instansi-instansi yang terlibat langsung dalam pengelolaan wisata daerah untuk menambah dana agar dapat mempermudah dalam pengelolaan objek wisata Desa Sungai Langka.
3. Stakeholder sebaiknya dapat segera memperbaiki media informasi petunjuk arah yang jelas dari gerbang Desa Sungai Langka, sehingga tidak terjadi hambatan dalam informasi mengenai jalan menuju tempat wisata.

REFERENCES

- Badarudin, 2013. Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Demartoto, A., 2008. Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pedesaan oleh Pelaku Wisata di Kabupaten Boyolali, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Sebelas Maret.
- Dwiyanto, A., 2011. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. 2 penyunt. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Feronica. 2019. Koordinasi Antar Stakeholder di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. STP Bandung.
- Fitri .Handayani, 2017. Analisis Peran Stakeholder dalam pengembangan objek wisata pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Melayu. 2011. Manajemen Dasar, Pengertian, dan masalah, Jakarta: Bumi Aksara.
- Magfud. 2015. Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. (Jurnal Administrasi Publik Vol.3 No. 12.2070-2076)
- Munawaroh, Kholifatul. 2016. Koordinasi Multistakeholder dalam proses rekrutmen Buruh Migran Asal Kabupaten Lampung Timur. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Moleong, L. J., 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. 1 penyunt. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2015. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan). Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahayu Sulistiowati., Meiliyana., Syamsul., & Selvi Diana M. Stakeholder Partnership in the Management of Marine Tourism in South Lampung Regency, Lampung. Indonesian Journal of Tourism and Leisure, 2020 Vol. 01 (2), 82-91.
- Rahmawati.Triana. Sinergitas Stakeholder dalam inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo. Jurnal Administrasi Publik. 2.3 (2014):641-647.
- Ratna, Sri. 2006. Pengorganisasian koordinasi Kerja. Departemen Agama. Jakarta
- Rico.Frits Dannerd. 2017. Koordinasi antar stakeholder dalam pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Sabaruddin, A., 2015. Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. 1 penyunt. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saharuddin dan siska. 2013. Hubungan Peran Stakeholder dengan partisipasi masyarakat dalam program Agrolitan Desa karacak Kecamatan Leuwilang Kabupaten Bogor, Vol.01 No 03. Hal 233. Diakses pada sabtu, 15 januari 2021 (<http://Journal.ipb.ac.id/>
- Santoso, P. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung : PT.

Refrika Aditama.

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 1 penyunt. Bandung: Alfabeta.

Sunaryo, Bambang.2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata:Konsep dan Aplikasi di Indonesia. Yogyakarta:Gava Media

Sukarno. Frenly.2016. Koordinasi Dalama Pengelolaan Objek wisata taman Nasional Kayan Menantang Di Desa Tanjung Lapang Kilometer Delapam Kabupaten Malinau. (Jurnal Pemerintahan Intergratif, (Vol.4., 217-232)

Sumber Lain :

Profil Desa Sungai Langka tahun 2015-2019

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat (5) bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Bps Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tahun 2017

Zulkifli, Dadan, 2018. swarapendidikan.co.id. [Online] Available at: <http://swarapendidikan.co.id/konsep-pengembangan-ekowisata/> [Accessed 6 Oct 2020].